

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Investasi PMDN, Investasi PMA Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Mahakam Ulu

Indira Reisia Angun¹, Eny Rochaida², Aji Sofyan Effendi³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: indiraangun@gmail.com

Article History:

Received: 23 September 2025

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keywords: Revenue Sharing Fund, Economic Growth, Unemployment, Investment, Poverty, Mahakam Ulu

Abstract: This study examines the impact of Revenue Sharing Funds (DBH), economic growth, the open unemployment rate, Domestic Investment (PMDN), and Foreign Investment (PMA) on poverty levels in Mahakam Ulu Regency. The research uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and related institutions for the 2014–2024 period. The analytical method applied is multiple linear regression using IBM SPSS version 29. The findings show that the independent variables DBH, economic growth, unemployment, PMDN, and PMA do not have a statistically significant effect on poverty levels in the region. Instead, poverty in Mahakam Ulu appears to be shaped more by structural, geographical, and social factors. These include limited accessibility due to regional isolation, inadequate infrastructure, high logistics costs, low human resource quality, and economic dependence on the primary sector. The study concludes that conventional macroeconomic indicators and financial inflows are insufficient to capture the complexities of poverty in Mahakam Ulu. To reduce poverty effectively, strategies should prioritize infrastructure development to overcome geographic barriers, enhance human capital through education and training, and encourage diversification of the local economy beyond extractive industries. Such an integrated approach is expected to create more sustainable poverty alleviation outcomes.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah baru hasil pemekaran tahun 2013. Tantangan geografis berupa keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun Mahakam Ulu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tingkat kemiskinan tetap tinggi dan mencerminkan belum optimalnya kinerja pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamaluddin, 1999;

Sukirno, 2004).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan, sementara pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan melalui efek trickle-down (Nanga, 2001; Sukirno, 2006). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam sering kali tidak inklusif dan gagal menurunkan kemiskinan apabila distribusi pendapatan tidak merata (Rustiono, 2008; Prasajo, 2009). Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperburuk kondisi kemiskinan, sebagaimana tercermin dalam teori makroekonomi yang menekankan hubungan erat antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Samuelson & Nordhaus, 2004; Kaufman & Hotchkiss, 1999).

Selain itu, investasi domestik maupun asing memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja. Teori pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya investasi sebagai pendorong produktivitas (Mankiw, 2007; Sukirno, 2006), dan studi empiris menunjukkan bahwa investasi di sektor riil dapat menurunkan kemiskinan (Rustiono, 2008; Prasajo, 2009). Namun, keterbatasan infrastruktur dan isolasi geografis membuat Mahakam Ulu kurang menarik bagi investor. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus mengintegrasikan pemanfaatan DBH, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan investasi berbasis lokal untuk menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif (Undang-Undang Republik Indonesia, 1967; Nanga, 2001).

LANDASAN TEORI

Teori Kemiskinan Absolut dan Relatif

Kemiskinan dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni absolut dan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, sebagaimana dirumuskan Rowntree (1901) dan dikembangkan lebih lanjut oleh World Bank melalui garis kemiskinan global. Sebaliknya, kemiskinan relatif menekankan pada aspek ketimpangan sosial, di mana individu dianggap miskin bila tidak dapat hidup sesuai standar yang berlaku di masyarakatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Townsend (1979).

Teori Struktural dan Kultural Kemiskinan

Teori struktural melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan sistemik dalam struktur ekonomi dan sosial, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya (Harrington, 1962). Sementara itu, teori kultural menekankan adanya “culture of poverty” yang diwariskan secara turun-temurun, di mana nilai, pola pikir, dan perilaku masyarakat miskin memperkuat kondisi kemiskinan itu sendiri (Lewis, 1966).

Teori Fungsionalis dan Konflik

Dari perspektif sosiologi, teori fungsionalis memandang kemiskinan memiliki fungsi sosial tertentu, seperti menyediakan tenaga kerja murah bagi sistem ekonomi, sebagaimana dijelaskan Gans (1971). Sebaliknya, teori konflik melihat kemiskinan sebagai konsekuensi eksploitasi kelas pemilik modal terhadap buruh, sebagaimana dijabarkan Marx dalam *Capital* (1867). Dalam konteks Indonesia, pendekatan konflik relevan untuk menjelaskan kesenjangan antara kelompok elit dan masyarakat marginal di desa maupun kota.

Teori Kemiskinan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi

Dalam teori pembangunan modern, kemiskinan tidak hanya terkait rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Todaro dan Smith

(2012) menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta redistribusi hasil pembangunan. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam RPJMN yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi lokal untuk menurunkan kemiskinan.

Kemiskinan Multidimensi

Konsep kemiskinan multidimensi muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan monodimensi berbasis pendapatan. Sen (1999) menekankan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan mencapai kebebasan substantif, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Alkire dan Foster (2007) kemudian mengembangkan Multidimensional Poverty Index (MPI) untuk mengukur aspek-aspek tersebut. Pendekatan ini kini banyak digunakan di Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan

METODE PENELITIAN

Definisi operasional penelitian ini meliputi variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu. DBH diukur berdasarkan transfer dana dari APBN dalam bentuk pajak maupun non-pajak yang masuk ke APBD, PDRB dihitung melalui nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, TPT diukur dari perbandingan jumlah pencari kerja dengan angkatan kerja, sementara PMDN dan PMA dihitung dari nilai nominal investasi proyek fisik maupun non-fisik, dan kemiskinan diukur dari persentase penduduk miskin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS dan instansi terkait periode 2014–2024 dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS versi 29 untuk menguji hubungan kausal antarvariabel (Riduwan & Engkos, 2013). Uji hipotesis mencakup uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap tingkat kemiskinan dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Wilayah ini terletak di hulu Sungai Mahakam dan termasuk kawasan strategis Heart of Borneo dengan kekayaan hutan hujan tropis yang luas. Sungai Mahakam memiliki peranan vital sebagai jalur transportasi, sumber pangan, serta penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat sejak dahulu. Kabupaten ini juga merupakan satu-satunya daerah perbatasan negara di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memiliki posisi geostrategis dan geopolitik penting, terlebih setelah penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang lokasinya relatif dekat.

Secara geografis, Mahakam Ulu memiliki luas 18.850 km² dengan kontur wilayah didominasi pegunungan, perbukitan, dan hutan tropis yang masih alami. Wilayah administrasinya terbagi dalam lima kecamatan, yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham, dengan total 50 kampung dan ibu kota berada di Ujoh Bilang. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 33.773 jiwa dengan persebaran tidak merata. Kecamatan Long Bagun menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, sedangkan kepadatan tertinggi ada di Long Hubung. Secara demografis, lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif, namun

kepadatan penduduk Mahakam Ulu masih terendah di Kalimantan Timur, yaitu hanya sekitar 2,12 jiwa/km².

Dari sisi ekonomi, Mahakam Ulu menunjukkan fluktuasi pertumbuhan dengan PDRB ADHK tahun 2023 mencapai 2,80%, naik dibandingkan 0,91% pada tahun sebelumnya, namun masih tergolong rendah dibanding rata-rata provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,22%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik, gas, serta jasa keuangan. Meski demikian, angka kemiskinan tetap tinggi, yakni 11,38% pada tahun 2023, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Timur. Kondisi ini diperburuk oleh garis kemiskinan yang tinggi, serta indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang relatif besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi sumber daya alam melimpah, Mahakam Ulu masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut BPS, penduduk dibagi menjadi usia kerja (15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja (bekerja dan pengangguran terbuka) serta bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mahakam Ulu pada 2022 tercatat 2,44%, menempati peringkat kedua terendah di Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara. Pada 2023, TPT Mahakam Ulu turun lagi menjadi 2,09% dan menjadi salah satu yang terendah di provinsi. Angka ini jauh di bawah rata-rata TPT Kalimantan Timur sebesar 5,31% sehingga menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Mahakam Ulu relatif lebih baik dibandingkan daerah lain meskipun masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas.

Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan penggerak utama perekonomian, namun realisasi investasi di Mahakam Ulu masih tergolong kecil dibandingkan daerah lain, meski memiliki potensi besar di sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan telekomunikasi. Pada 2022, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp285 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$3,8 juta. Tahun 2023, PMA meningkat tajam menjadi US\$23,09 juta dari 28 proyek, sementara PMDN justru turun menjadi Rp189,18 miliar meski jumlah proyek bertambah. Kondisi ini menunjukkan potensi iklim investasi yang kondusif, namun daya saing Mahakam Ulu masih rendah dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Untuk memperkuat daya tarik investasi, dibutuhkan pembangunan infrastruktur, promosi investasi, serta insentif yang dapat menarik investor sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linier berganda, diperoleh nilai **R = 0,803** yang menunjukkan adanya korelasi cukup kuat antara variabel bebas (X1, X2, X3, X4, dan X5) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mahakam Ulu. Nilai **R Square = 0,645** mengindikasikan bahwa 64,5% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas, sementara 35,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Namun demikian, nilai Adjusted R Square = 0,289 relatif rendah, yang mengindikasikan adanya kemungkinan multikolinearitas atau keterbatasan jumlah sampel penelitian (N=11) sehingga membuat model kurang stabil. Nilai Durbin-Watson = 1,458 mendekati angka 2, sehingga tidak ditemukan indikasi autokorelasi pada residual.

Hasil uji simultan (ANOVA) menunjukkan nilai F = 1,814 dengan signifikansi 0,265 (> 0,05). Hal ini berarti secara keseluruhan model regresi tidak signifikan. Dengan kata lain, variabel independen (X1–X5) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Analisis Koefisien Regresi Parsial

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Rincian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (t-test) Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	Keterangan
X1 (Dana Bagi Hasil)	2.114E-13	0,446	0,674	Tidak signifikan
X2 (Pertumbuhan Ekonomi)	0,047	0,422	0,691	Tidak signifikan
X3 (Tingkat Pengangguran)	0,004	0,033	0,975	Tidak signifikan
X4 (Investasi PMDN)	1.190E-6	1,205	0,282	Tidak signifikan
X5 (Investasi PMA)	-2.232E-5	-1,598	0,171	Tidak signifikan

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, variabel Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Investasi PMDN, dan Investasi PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Analisis Residual

Hasil uji residual menunjukkan bahwa nilai *Standardized Residual* berada pada rentang -1,748 hingga 1,087, sehingga masih tergolong normal karena berada di bawah ambang batas ± 2 . Namun, nilai *Cook's Distance* maksimum mencapai 4,153 dan *Leverage Value* maksimum sebesar 0,895, yang relatif tinggi dan mengindikasikan adanya data *outlier* atau pengamatan tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap model regresi. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa nilai R cukup tinggi, tetapi tidak ada variabel independen yang signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Analisis Ketidaksignifikanan Variabel

Secara simultan, variabel Dana Bagi Hasil (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X3), Investasi PMDN (X4), dan Investasi PMA (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampel yang kecil ($N=11$) sehingga mengurangi kekuatan statistik, kemungkinan adanya multikolinearitas antarvariabel, serta keterbatasan indikator variabel yang kurang sesuai dengan kondisi spesifik wilayah Mahakam Ulu. Selain itu, keberadaan *outlier* dalam data semakin memperlemah signifikansi model.

Analisis Variabel Bebas secara Parsial

Berdasarkan uji parsial, masing-masing variabel independen menunjukkan hasil yang tidak signifikan. X1 (Dana Bagi Hasil) memiliki nilai sig. 0,674, X2 (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 0,691, X3 (Pengangguran) sebesar 0,975, X4 (Investasi PMDN) sebesar 0,282, dan X5 (Investasi PMA) sebesar 0,171. Nilai-nilai ini berada di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Bahkan, koefisien regresi yang sangat kecil menunjukkan bahwa kontribusi variabel terhadap perubahan tingkat kemiskinan hampir tidak berarti. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa variabel struktural lebih dominan dalam menjelaskan kemiskinan di Mahakam Ulu.

Faktor Struktural dan Geografis

Tidak signifikannya variabel X1–X5 menunjukkan bahwa kemiskinan di Mahakam Ulu lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dan geografis. Wilayah ini memiliki keterisolasian tinggi dengan akses transportasi terbatas, infrastruktur dasar yang belum memadai, harga kebutuhan pokok yang mahal, serta ketergantungan ekonomi pada sektor primer. Faktor-faktor tersebut

berdampak langsung terhadap tingginya biaya hidup dan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan.

Faktor Sosial-Budaya dan SDM

Selain faktor struktural, aspek sosial dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi penyebab utama kemiskinan. Rendahnya akses pendidikan menengah dan tinggi, terbatasnya fasilitas kesehatan, serta masih kuatnya pola hidup subsisten masyarakat adat membuat mereka sulit beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern. Hal ini berimplikasi pada rendahnya keterampilan tenaga kerja, minimnya daya saing, serta terbatasnya kesempatan masuk ke sektor formal yang lebih produktif.

Sintesis Analisis

Berdasarkan hasil analisis regresi dan faktor-faktor relevan yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa variabel ekonomi makro yang diuji dalam penelitian ini tidak mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu. Sebaliknya, kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural, geografis, sosial, dan budaya yang khas wilayah perbatasan. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penurunan biaya logistik, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kualitas SDM dan akses layanan dasar. Hasil ini tidak menandakan kegagalan penelitian, tetapi justru memberikan arah baru bagi perumusan kebijakan berbasis konteks lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, investasi PMDN, maupun investasi PMA tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu. Sintesis analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang lebih dominan memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah ini justru berasal dari kondisi struktural, geografis, dan sosial. Beberapa faktor utama tersebut meliputi keterisolasian wilayah yang membatasi akses masyarakat terhadap pusat ekonomi, layanan publik, dan distribusi barang; infrastruktur dasar yang belum memadai, baik dari sisi transportasi, listrik, air bersih, maupun sarana sosial; serta harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat mahal biaya logistik.

Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan semakin memperburuk kondisi. Minimnya investasi dan lapangan kerja formal menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Faktor sosial-budaya, seperti pola hidup subsisten masyarakat adat, juga berkontribusi dalam mempersempit peluang peningkatan kesejahteraan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural, geografis, dan sosial-budaya dibandingkan oleh variabel-variabel bebas (X1–X5) yang diuji dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada perbaikan infrastruktur, penguatan layanan dasar, diversifikasi ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Kamaluddin, R. (1999). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The Economics of Labor Markets*. USA: Georgia State University.
- Mankiw, G. N. (2007). *Makroekonomi* (Edisi keenam). Jakarta: Erlangga.
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Edisi perdana). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasojo, P. (2009). *Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rustiono, D. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* (Tesis). Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Edukasi.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).